



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENINGKATAN KAPASITAS SDM SEKTOR PANGAN

Masyithah Aulia Adhiem
Analisis Legislatif Ahli Muda
masyithah.adhiem@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sektor pangan dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perubahan iklim, penambahan penduduk, serta keterbatasan lahan. Kemampuan sumber daya manusia (SDM) di sektor tersebut sangat menentukan keberhasilan menghadapi tantangan yang ada. Peningkatan kapasitas petani, peternak, nelayan, pembudidaya, dan pekerja sektor pangan lainnya menjadi hal penting yang tidak dapat dikesampingkan seiring dengan upaya pencapaian swasembada pangan nasional. Selain itu, SDM sektor pangan yang berdaya dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor di masa mendatang. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penguatan kapasitas SDM sektor pangan di Indonesia.

Salah satu bentuk upaya untuk memperkuat kapasitas dilakukan oleh Kementerian Pertanian (Kementan), yang tengah menyusun materi uji kompetensi terbaru bagi penyuluh sebagai bagian dari percepatan pengembangan SDM. Pengayaan materi secara berkelanjutan diharapkan dapat membantu penyuluh dalam memberikan pendampingan dan bimbingan kepada para petani. Hal ini juga disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang menyatakan bahwa penyuluh berperan sebagai garda terdepan dalam menyampaikan inovasi, teknologi, dan pengetahuan kepada petani. Selain itu, penyuluh juga berfungsi sebagai penghubung utama antara kebijakan pemerintah dan petani.

Peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian telah banyak dikembangkan dalam bentuk kerja sama antara kelompok tani dengan sektor industri. Seperti yang dilakukan oleh PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) bekerja sama dengan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) dan Yayasan Social Transformation And Public Awareness (STAPA) Center melalui program modernisasi alat panen. Selain itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) juga menginisiasi Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) yang ditujukan bagi kelompok tani dengan tujuan memberikan pendampingan dalam meningkatkan hasil cocok tanam jagung. Program ini juga membuka kesempatan bagi petani untuk berkonsultasi mengenai berbagai masalah yang mereka hadapi terkait produksi lahan mereka.

Penguatan kapasitas bagi peternak juga telah dilakukan, salah satunya melalui pendampingan dalam pengolahan pakan ternak di Desa Sukadana, Lombok Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB bekerja sama dengan Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Tujuan pendampingan ini adalah meningkatkan ketangguhan peternak dalam menghadapi perubahan iklim yang menyebabkan kesulitan dalam ketersediaan pakan ternak. Materi yang diberikan mencakup berbagai aspek, seperti manajemen usaha peternakan, pemeliharaan ternak ruminansia, integrasi sistem pertanian dan peternakan, teknik pengawetan hijauan pakan, serta pembuatan pakan ternak dari jerami. Contoh lainnya adalah pemberian pendampingan bagi peternak sapi di Lembang dalam mengubah kotoran ternak menjadi biogas melalui fermentasi anorganik. Hasil biogas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, terutama saat terjadi kelangkaan gas ukuran 3 kg beberapa saat lalu.

Program pendampingan untuk meningkatkan kapasitas perlu terus berlanjut sebagai upaya mendukung swasembada pangan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan ini antara lain, *pertama*, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi. Utamanya dalam memperkenalkan dan memanfaatkan teknologi di sektor pangan. *Kedua*, memperkuat kelembagaan melalui kelompok-kelompok tani atau nelayan. Kelembagaan yang kuat akan mempermudah akses terhadap pembelajaran teknologi baru, pembiayaan untuk meningkatkan produksi, serta perluasan akses pasar. *Ketiga* memperluas kerja sama antara kelompok tani atau nelayan dengan sektor swasta atau industri, dengan memastikan bantuan yang diberikan tidak hanya berupa bantuan alat pertanian, tetapi juga pendampingan berkelanjutan dan transfer teknologi.

Atensi DPR

Peningkatan kapasitas SDM di sektor pangan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan swasembada pangan nasional yang saat ini menjadi salah satu agenda utama pemerintah. DPR RI, melalui Komisi IV, perlu terus mendorong seluruh pihak untuk berperan aktif dalam memberikan pendampingan bagi pekerja di sektor pangan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi IV DPR RI dapat memastikan bahwa peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian dari kebijakan yang sudah dan akan diterapkan oleh mitra kerja komisi. Selain itu, diperlukan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan sektor industri, untuk berperan aktif dalam pendampingan dan pemberdayaan SDM sektor pangan. Dalam menjalankan fungsi anggaran, Komisi IV DPR RI juga perlu memastikan bahwa alokasi anggaran bagi mitra kerja komisi memprioritaskan program pemberdayaan SDM, khususnya bagi petani, peternak, nelayan, pembudidaya, dan pekerja lain di sektor pangan.

Sumber

antaranews.com, 27 Februari 2025;
kompas.com, 28 Februari 2025;
lombok.tribunnews.com, 27 Februari 2025;
mediaindonesia.com, 25 dan 26 Februari 2025;
republika.co.id, 1 Maret 2025; dan
rri.co.id, 26 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making